Padang Ekspres
SABTU ■ 12 MEI 2018

Islam dan Politik di Minangkabau

ISRAR ISKANDAR
Dosen Sejarah FIB Unand

KEISLAMAN dan keminangkabauan tak bisa dipisahkan. Islam telah menjadi bagian intrinsik dari sistem sosial dan kebudayaan Minangkabau, seperti tercermin dari pernyataan *Adaik Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al Quran). Paralel dengan itu, seorang Minang mestilah seorang muslim. Jika seorang Minang keluar dari Islam, ia akan "dibuang sepanjang adat", tak lagi diakui sebagai Minang.

Namun di ranah politik, orang Minang memiliki ekspresi politik beragam dan fleksibel. Tidak semua Minang menjadikan Islam sebagai idiologi politiknya. Partai dengan kategori "non-agamis" dan "nasionalis" juga eksis dan berkembang di Sumbar. Sementara itu, partai-partai Islam dulu pernah berjaya, namun belakangan pamornya cenderung stagnan dan bahkan melorot, seperti tercermin dari hasil pemilu-pemilu legislatif pasca-Orde Baru.

Belakangan ini memang ada pula kecenderungan bahwa ekspresi Islam politik tak hanya dicerminkan lewat pilihan pada partai Islam saja. Ekspresi Islam politik warga Sumbar secara lebih luas kini juga tercerminkan dari preferensi mereka pada ketokohan tertentu yang dianggap "akomodatif" terhadap Islam dan kepentingan lokal, sekalipun dengan dasar penilaian yang untuk sebagian masih bersifat sumir.

Perspektif Historis

Apa yang berkembang pada periode mutakhir tak terlalu mengherankan. Dalam sejarah modern Minangkabau, idiologi politik yang berkembang di kalangan puak yang notabene demokratis ini cukup beragam. Selain idiologi politik Islam, di daerah ini juga hidup dan berkembang idiologi nasionalisme, sosialisme, demokrasi, tradisionalisme dan bahkan komunisme.

Pasca Kemerdekaan, idiologi-idiologi politik itu mengejawantah dalam bentuk partai-partai politik, termasuk di Minangkabau. Hasil pemilu 1955 menunjukkan idiologi politik Islamlah yang dominan di Sumbar. Partai Masyumi tampil sebagai pemuncak dengan 49 persen suara, disusul Perti 28 persen suara di tempat kedua.

PKI bertengger di posisi ketiga dengan 7 persen suara, disusul PII 4 persen, PSII 3 persen, dan PSI 2 persen. Sementara itu, PNI yang digdaya secara nasional dan NU di urutan ketiga, di Sumbar masing-masing hanya memperoleh 1 persen suara. Dilihat secara garis besar, kumulasi suara partai-partai Islam mencapai 80 persen lebih (Zed *et al*, 1998:131).

Namun di masa peralihan ke dekade berikutnya, malapetaka melanda kekuatan Islam politik terbesar dan juga etnik Minang secara umum. Masyumi "dibubarkan" atau dipaksa membubarkan diri karena dianggap terlibat PRRI (1958-1961) yang berbasis di Sumatera Tengah. Di masa "Demokrasi Terpimpin" (1959-1965), Islam politik di daerah ini secara umum diwakili Perti, tapi tak bisa berperan maksimal di bawah sistem otoritarian.

Selanjutnya di masa otoriterianisme Orde Baru, proyek deidiologisasi rezim Soeharto membuat Islam politik makin terpuruk. Alih-alih merehabilitasi Masyumi, kekuatan Islam politik malah dipecah-pecah. Sebagian mereka yang masih aktif di jalur politik memilih PPP dan lainnya berlabuh di Golkar, partai yang menjadi instrumen sistem otoriter Orba. Di Sumbar, banyak agamawan lokal yang kemudian menjadi "*vote-getter*"-nya Beringin.

Namun untuk konteks pengalaman Sumbar, Orba dianggap "berjasa" memulihkan kondisi daerah yang "babak belur" pasca-prahara PRRI dan "Demokrasi Terpimpin". Dukungan maksimal orang Minang di ranah maupun rantau terhadap Golkar untuk sebagian dianggap sebagai refleksi pilihan "rasional" kala itu.

Namun risikonya, pilihan "rasional" itu sekaligus ikut mengubah kecenderungan politik Minang dari sebelumnya (lebih) berorientasi pada "Islamisme" yang idiologis menjadi "pembangunanisme" yang pragmatis. Tak heran, PPP yang dianggap representasi Islam politik kalah telak dari Golkar, terlepas dari fakta bahwa Golkar adalah instrumen sistem Orba untuk memenangkan pemilu-pemilu manipulatif masa itu (Haris, 2010).

Arus pragmatisme

Ketika pemilu sistem multipartai kembali digelar di era reformasi, ternyata model konfigurasi politik dekade 1950-an tidak lagi muncul di Sumbar. Pemilu legislatif 1999 yang demokratis justru (kembali) dimenangkan Golkar yang notabene bukan partai agamis, "non-idiologis", dan pernah pula menjadi "sasaran tembak" kaum reformis kota di ujung periode otoritarian.

Nampaknya pengaruh "deidiologisasi" Orba begitu kuat terhadap perilaku politik warga Sumbar hingga era reformasi. Preferensi warga lokal terhadap partai-partai yang punya "tali darah" dengan Orba terasa lebih kuat seperti tercermin dari kemenangan Golkar pada Pemilu 1999, 2004, dan 2014 serta keunggulan Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Kumulasi partai-partai "non-idiologis" jauh melampaui partai-partai Islamis.

Untuk pilpres, dalam batas tertentu, ada juga kecenderungan demikian. Tanpa menafikan faktor pasangan dan kompetitor politik, ada tendensi warga Sumbar mendukung tokoh yang dianggap punya "geneologi politik" dengan Orba, sekalipun juga yang mencerminkan akomodasi pada kepentingan Islam. Kemenangan SBY-JK dalam Pilpres 2004, SBY-Boediono pada 2009 dan Prabowo-Hatta pada 2014 di Sumbar (tapi Prabowo-Hatta

Scanned by CamScanner